

# STRATEGI EKONOMI HAJI DI HINDIA BELANDA AWAL ABAD 19

## *ECONOMIC STRATEGY OF HAJJ IN THE EARLY 19TH CENTURY OF THE DUTCH EAST INDIES*

**Eka Yudha Wibowo** ✉

Universitas Negeri Semarang

✉kay\_yudha@yahoo.co.id

Article history:

Submitted: 02 Juli 2023

Accepted: 07 Agustus 2023

Published: 08 Agustus 2023

**Abstrak:** Ibadah haji yang dilakukan para jemaat haji dari wilayah hindia Belanda pada awal abad 19 tidak hanya berkontribusi dalam bidang keagamaan maupun politik. Ibadah haji juga berkontribusi besar dalam bidang ekonomi. Para haji ini selain mendapatkan pengalaman spritual dan keterbukaan dalam bidang pemikiran Pan Islamisme di Timur Tengah, mereka juga turut mendukung kemajuan ekonomi di wilayah mereka masing-masing ketika kembali ke tanah air. Penelitian ini menggunakan metodologi sejarah yang meliputi tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Kajian ini diteliti dengan melihat strategi ekonomi yang dijalankan oleh para haji ketika mereka kembali ke tanah air dan kontribusinya terhadap berbagai bidang sosial masyarakat di Indonesia. Haji dalam hal ini haji berperan dalam mengembangkan etos bagi umat Islam yaitu kerja keras dan hemat, rajin menabung, adanya perubahan budaya ekonomi dari jasa ke uang, dan menciptakan lapangan pekerjaan serta pengenalan transaksi ekonomi antar daerah yang berjauhan. Munculnya para haji ini turut menguntungkan pemerintah kolonial yang di kemudian hari mendapatkan *pas jalan* (reispas) dari calon haji.

**Kata Kunci:** Haji; Ekonomi; Etos Kerja; Hindia Belanda.

**Abstract:** *The pilgrimage performed by pilgrims from the Dutch East Indies region in the early 19th century did not only contribute to the religious and political fields. The pilgrimage also contributes greatly to the economy. Apart from gaining spiritual experience and openness in the field of Pan-Islamic thought in the Middle East, these hajjis also support economic progress in their respective regions when they return to their homeland. This study uses historical methodology which includes heuristic, verification, interpretation and historiography stages. This study is examined by looking at the economic strategies carried out by the hajjis when they return to their homeland and their contribution to various social fields of society in Indonesia. Hajj, in this case Hajj, plays a role in developing an ethos for Muslims, namely hard work and thrift, diligent saving, a change in economic culture from services to money, and creating jobs and the introduction of economic transactions between regions that are far apart. The appearance of these pilgrims also benefited the colonial government, which later obtained travel funds (reispass) from prospective pilgrims.*

**Keywords:** *Hajj; Economy; Work Ethics; Dutch East Indies*

P-ISSN 2798-196X E-ISSN 2798-3110 © 2023 author(s)

Published by UIN Raden Mas Said Surakarta, this is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) license.

DOI: 10.22515/isnad.v4i1.7430

## **PENDAHULUAN**

Ibadah haji termasuk sebuah peribadatan yang dijalankan oleh seorang muslim dan termasuk dalam salah satu rukun Islam. Seseorang yang telah matang secara material dan spiritual diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini dikarenakan Islam memandang bahwasanya ibadah haji sebagai penyempurna dari ibadah-ibadah lain. Keinginan masyarakat di Hindia Belanda awal abad 19 dalam rangka pelaksanaan ibadah ke Baitullah cukup besar. Seiring berjalannya waktu, ibadah Haji di wilayah Hindia Belanda berkembang menjadi semacam rutinitas yang dilakukan setiap tahunnya.<sup>1</sup>

Pada rentang tahun 1824-1859, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda melakukan pengetatan pemberangkatan haji kepada umat Islam di Nusantara. Kolonial menilai bahwa haji menjadi ancaman eksistensi kolonial di Indonesia. Makna politis ibadah haji baru dirasakan secara serius tatkala negara Hindia Belanda berdiri sebagai penerus kekuasaan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menganggap, seseorang yang pulang dari ibadah haji mempunyai potensi menggerakkan rakyat untuk melakukan pemberontakan terhadap kolonial. Segala upaya dilakukan oleh Hindia Belanda, dari mulai pengetatan pemberangkatan dan aturan-aturan lain setelah pulang dari tanah suci. Kekhawatiran pemerintah kolonial tercermin dalam Ordonansi Haji tahun 1825, berisi pembatasan dan pengetatan jumlah haji yang berangkat.<sup>2</sup>

Setiap ulama atau kyai lokal berusaha untuk melaksanakan ibadah ini, meski sering kali dipersulit oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka yang bisa melaksanakan Haji dan bisa pulang dengan selamat Mereka yang sudah mendapatkan gelar haji dan pernah pergi ke tanah suci, berupaya untuk bisa berangkat lagi serta mempertahankan kehidupan ekonomi mereka sebagai seorang haji. Gelar haji tidak serta-merta sebagai lambang prestise semata, namun juga berkenaan dengan kondisi keuangan mereka selama menjadi haji di wilayah hindia Belanda. Ketika mereka pulang ke tanah kelahiran pun dianggap sebagai orang yang sudah mencapai tingkatan tertentu dalam hierarkie masyarakat pribumi. Selanjutnya para haji ini bekerja keras untuk menstabilkan ekonomi mereka bahkan mengembangkan kekuatan ekonomi dengan tujuan mempertahankan eksistensinya sebagai seorang haji.

## **METODE PENELITIAN**

Di dalam penulisan karya ini demi memperoleh hasil yang objektif melalui metodologi sejarah yang meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Adapun tahapannya dengan cara

---

<sup>1</sup> Eka Yudha Wibowo, "Ibadah Haji Dan Kontribusinya Terhadap Berbagai Bidang Sosial Masyarakat Di Indonesia (Tahun 1900-1945)," *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 4, no. 2 (2019): 75–91, <https://doi.org/10.22515/shahih.v4i2.1875>.

<sup>2</sup> Fathoni Ahmad, "Sejarah Haji Di Era Kolonial Hindia Belanda," NU Online, accessed July 31, 2023, <https://www.nu.or.id/fragmen/sejarah-haji-di-era-kolonial-hindia-belanda-tlGMF>.

menghimpun beberapa sumber, menguji, menganalisa, dan menafsirkan gejala peristiwa yang terjadi pada masa lampau. *Pertama*, secara terperinci dalam tahapan heuristik yaitu dengan menelusuri berbagai literatur dari sumber terpercaya seperti buku, jurnal, laporan penelitian yang berkaitan dengan kontribusi haji terhadap ekonomi Islam di Indonesia.<sup>3</sup>

*Kedua*, dalam verifikasi sumber dan referensi untuk mendapatkan fakta yang kuat dilakukan (1) kritik eksternal untuk menguji dan mencari tahu keautentikannya demi mendapatkan sumber yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, (2) kritik internal untuk mengetahui kredibilitas sumber sejarah dengan langkah membaca, mempelajari, memahami dan menelaah secara mendalam berbagai sumber. Selanjutnya membandingkan antara isi sumber yang satu dengan yang lain guna menemukan keabsahan sumber dan menemukan kesimpulan. *Ketiga*, interpretasi (penafsiran) terhadap sumber-sumber yang sudah teruji kebenarannya. Interpretasi ini bagian dari proses menganalisis dan menguraikan rujukan yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan intelektual dan politik guna memperoleh informasi yang relevan dan objektif terkait pengaruh ibadah haji terhadap politik Islam di Indonesia.<sup>4</sup> *Keempat*, penulisan (historiografi), yaitu mendeskripsikan hasil temuan secara jelas dan kongkret dalam bentuk tulisan yang sistematis namun singkat dan padat.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Haji Pemerintah Kolonial Belanda.

Sekitar akhir abad ke 19, Indonesia atau yang dahulu dikenal dengan wilayah Hindia Belanda mempunyai jamaah haji yang cukup besar. Selain itu jamaah haji paling aktif di Makkah juga berasal dari Indonesia. Selanjutnya, haji turut mempengaruhi pola pergerakan perjuangan bangsa untuk melawan pemerintahan Belanda yang dianggap kafir dan penjajah. Di kota Makkah, terdapat semacam yayasan yang menampung para generasi muda yang berasal dari Hindia Belanda yang lambat laun membentuk solidaritas sesama muslim sederhana dan dijadikan wadah untuk menempa serta mengasah intelektual berkaitan dengan Pan Islamisme atau persatuan Islam. Inilah yang kemudian membuat Belanda bereaksi dikarenakan adanya perlawanan pemikiran yang bertentangan dengan ideologi imperialisme. Akibat ketakutan yang muncul dari para haji yang

---

<sup>3</sup> Muniful Ichsan Al Hafizi and Adelia Intan Ardiani, "Historiografi Al-Qur'an Akbar Gagasan Kh. Muntaha Al-Hafidz Di Pondok Pesantren Al-Asy' Ariyyah Tahun 1991-1994," *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 3, no. 2 (2022): 16–27, <https://doi.org/10.22515/isnad.v3i2.5967>.

<sup>4</sup> Qisthi Faradina Ilma Mahanani et al., "ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA (Perspektif Sejarah)," *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 3, no. 1 (2022): 62–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/isnad.v3i1.5395>.

<sup>5</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), 45.

kembali ke daerah asal Belanda kemudian menempatkan perwakilannya di Jeddah dengan tujuan mengawasi sepak terjang mereka di sana.<sup>6</sup>

Pemerintah Hindia Belanda menempatkan ahlinya untuk melakukan riset mendalam mengenai Haji di Makkah, orang tersebut bernama Snouck Hurgronje. Di Belanda ia juga mendirikan jurusan Indologi, jurusan yang membekali mahasiswa dan para pekerja dari Belanda mengenai apapun yang perlu dipelajari sebelum dikirim ke wilayah Nusantara dan bekerja bagi pemerintahan kolonial. Setelah melakukan riset mendalam, Snouck berpandangan bahwa ibadah haji tidak perlu dilarang secara terang-terangan. Menurutny adalah hal yang keliru apabila seorang muslim yang pergi haji akan menjadi agitator. Kenyataannya sebagian besar masyarakat yang melakukan ibadah haji di Makkah masih bersifat lunak terhadap pemerintah kolonial Belanda. Meskipun terkadang sepulang ibadah haji mereka berpakaian seperti orang Arab dan sering kali menyematkan nama Arab, namun sebenarnya mereka masih tetap sama seperti sebelum mereka berangkat haji.<sup>7</sup>

Nampak sekali perbedaan yang mencolok antara jamaah haji yang bermukim beberapa bulan di Makkah, dengan para mukimin yang tinggal di sana selama bertahun-tahun untuk memperdalam ilmu agama.<sup>8</sup> Menurut Snouck, orang pribumi yang berlayar ke Jeddah bak ikan teri yang berjubel-jubel, setibanya di tanah suci mereka dibawa kesana kemari oleh para *syaikh* haji ke lokasi yang dianggap keramat.<sup>9</sup>

Salah satu hasil analisis dari pemerintah Belanda yang kemudian diambil kesimpulan bahwa di kota suci Makkah terletak sebuah jantung kehidupan beragama yang berasal dari wilayah kepulauan Nusantara, yang setiap detik terus memompakan darah segar kepada penduduk muslim Hindia Belanda. Di jazirah arab ini pula para mukmin Nusantara bersinggungan dengan atmosfer Islam Internasional yakni Pan Islamisme.<sup>10</sup>

Meskipun sebagian besar jamaah haji ini punya keinginan kuat untuk melaksanakan perjalanan haji, namun hanya sebagian kecil saja yang mempunyai bekal pemahaman agama yang kuat, sebagian yang lain masih lemah dalam pemahaman keagamaan. Di Jawa khususnya, masyarakatnya masih kental campuran sinkretisme dan berdampak pada tingginya corak kehidupan yang berkaitan erat dengan mitos dan tahayul.

Dari hal tersebut kemudian memunculkan dua persepsi mengenai para haji. *Pertama*, pelaku ibadah haji bagi masyarakat biasa yang mempunyai pemahaman agama lemah mereka

---

<sup>6</sup> Aqib Suminto, *Politik Islam* (Jakarta: LP3ES, 1996), 93.

<sup>7</sup> Aqib Suminto, *Politik Islam*, 96.

<sup>8</sup> Snouck mengamati bahwa jamaah haji yang tinggal sebentar hanya untuk ibadah, tidak akan membahayakan pemerintahan kolonial.

<sup>9</sup> Snouck Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda*, trj. S. Gunawan (Jakarta: Bahrataraya Karya Aksara, 1973), 27.

<sup>10</sup> Snouck Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda*, trj. S. Gunawan, 95.

dianggap sebagai orang suci dan mempunyai kekuatan gaib. Bagi pemerintah Kolonial, mereka yang sudah melaksanakan haji sebagian besar mirip seperti “golongan pendeta” yang secara sosial lebih banyak menghabiskan waktu untuk beribadah.<sup>11</sup> *Kedua*, adanya unsur politik, para haji berperan dalam siasat politik dan sering kali memimpin suatu gerakan untuk menentang pemerintah kolonial dianggap kafir.<sup>12</sup>

Pengaruh fanatik dari Pan Islamisme tidak berlaku untuk semua jamaah haji Nusantara di Makkah, hanya sebagian kecil saja yang terdampak. Sebagai penasehat Gubernur Hindia Belanda, Snouck menyampaikan gagasannya kepada pemerintah kolonial untuk tidak terlalu mengkhawatirkan pengaruh dari haji musiman. Selanjutnya, langkah yang ditempuh untuk mengatasi persoalan haji dengan mengalihkan semangat pribumi ke arah lain dan menghambatnya secara halus.

### **Kondisi Ekonomi Hindia Belanda secara umum**

Pada awal abad 19, wilayah Jawa dan Sumatra termasuk wilayah agraris yang bertanah subur. Sebagian besar masyarakat lokal bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian di Jawa dan Sumatra dilakukan dengan cara tradisonal dengan berbekal teknologi sederhana. Perekonomian diorganisir berdasarkan sistem tanam paksa. Menurut sistem ini, pungutan dari rakyat tidak lagi berupa uang tetapi berupa hasil tanaman yang dapat diekspor.<sup>13</sup> Petani wajib menyerahkan 1/5 dari tanah mereka kepada pemerintah untuk tanaman tertentu, seperti tebu, nila, kopi, teh, tembakau, kayu manis, dan kapas. Mereka menyerahkan produksi pertanian sebagai upeti atau pajak. Petani juga diwajibkan menyumbangkan tenaganya untuk membangun saluran irigasi, jalan, dan jembatan, membersihkan tanah kosong, bahkan untuk membangun infrastruktur perekonomian pada sebuah pulau.<sup>14</sup>

Menghadapi model kehidupan penduduk pribumi yang serba kekurangan dan menderita, kaum liberal berasumsi bahwa hal ini dikarenakan sistem feodal yang dijalankan pemerintahan Belanda.<sup>15</sup> Gubernur Hindia Belanda saat itu Dirk Van Hogendorp (1799-1808) menetapkan kebijakan agar kedudukan pemangku kekuasaan lokal, bupati dan lurah perlu ditinjau ulang. Sistem feodal dalam kepemilikan tanah sebagai sumber pemerasan harus dihilangkan dan tanah yang selama ini di kelola Pemerintah Hindia Belanda harus dikembalikan kepada rakyat setempat.

---

<sup>11</sup> Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*, terj. Soedarso Soekarno (Jakarta: INIS, 1997), 8.

<sup>12</sup> Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 235.

<sup>13</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1999), 306.

<sup>14</sup> Ira M Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 311.

<sup>15</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah*, 290.

Pemerintah kolonial menyediakan tanah untuk ditanami tanaman secara bebas, mereka juga dibebaskan untuk memilih jenis tanaman dan cara pengolahannya. Di lain pihak, penduduk harus menyetorkan sebagian hasil bumi sebagai bentuk pajak kepada pemerintah kolonial Belanda. Meskipun demikian struktur feodal dan kedudukan bupati lokal masih sangat kuat di masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya masih membutuhkan bantuan dari penguasa lokal. Hal ini dikarenakan model kepemimpinan lokal terutama di Jawa berakar kuat dalam sendi masyarakat, sehingga untuk menggeser kedudukan mereka cukup sulit.

Sistem feodal yang berjalan di Jawa pada awal abad 19 dalam kegiatan perekonomian masyarakat lokal dalam dunia perdagangan masih memakai sistem barter, bertransaksi dengan cara tukar menukar barang. Barang yang mereka barterkan seperti halnya kopi dengan garam, beras dengan kapas dan hampir jarang sekali ditukar dengan mata uang. Perdagangan yang berjalan saat itu berjalan dengan rute relatif pendek, hal ini dikarenakan kondisi jalan yang buruk dan belum memakai pengeras jalan.<sup>16</sup>

Pemerintah kolonial sebelum tahun 1795-an telah menerapkan sistem pemerasan hasil pertanian seperti kopi dan lada, dengan jalan penyerahan paksa dan memperdagangkannya ke pasaran Eropa. Pada tahun 1795, akibat kekalahan perang dengan Prancis Belanda kemudian mengeluarkan kebijakan eksploitasi ekonomi wilayah jajahan. Gubernur Daendels pada tahun 1806 kemudian dikirim ke wilayah Hindia Belanda untuk menundukkan penguasa lokal, dengan langkah mengurangi *power* para penguasa lama yang menempati jabatan di pemerintahan Belanda sekaligus meningkatkan produksi kapas dan kopi di Nusantara.

Perkembangan ekonomi selanjutnya pada penduduk pribumi pada masa liberal ditandai dengan munculnya para buruh tani, petani pemilik lahan dan pedagang antara di wilayah Hindia Belanda.<sup>17</sup> Kondisi demikian bertahan hingga memasuki masa Politik Etis awal abad 20. Kebijakan Politik Etis dijadikan sebuah skenario guna membayar hutang bagi penduduk lokal dengan cara meningkatkan kesejahteraan rakyat, meskipun kenyataannya tidak berhasil. Meski terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam bidang industri agraris, pertambangan dan pengangkutan, kenyataannya tenaga rakyat tetap dibayar dengan harga murah.<sup>18</sup>

Pada masa akhir pemerintahan Belanda di Indonesia, muncul kaum kelas menengah baru yang berkembang di bawah perlindungan Belanda dan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan *priyayi*. Mereka terdiri dari orang-orang Indonesia, umumnya masyarakat Jawa, yang menjadi

---

<sup>16</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah*, 303.

<sup>17</sup> M Saleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 334.

<sup>18</sup> Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jld IV (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), 60.

pegawai pemerintahan kolonial di Yogyakarta.<sup>19</sup> Sebagian besar dari orang-orang ini mempunyai pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah. Dalam hal tindakan mereka lebih mempunyai gagasan yang bebas dan mudah menerima pandangan-pandangan baru. Akibatnya banyak dari mereka yang kehilangan kebudayaan aslinya karena terkontaminasi kebudayaan Belanda.<sup>20</sup> Mereka juga sering diundang oleh para keluarga Belanda untuk tinggal di dalam lingkungan tinggal rumah tangganya. Dari sudut pandang *priyayi*, termasuk kesempatan yang menguntungkan mereka guna mempelajari strategi hidup kelompok yang berkuasa dengan mengadakan kontak-kontak yang berharga. Dampak yang muncul dari pergaulan mereka dengan masyarakat Eropa mempengaruhi cara berfikir dan pengetahuan para *priyayi* dalam hal bahasa Belanda, sehingga menjadi sekat antara dari teman sejawatnya yang berada di posisi bawah.<sup>21</sup>

### **Kontribusi Haji bagi kehidupan ekonomi di Hindia Belanda**

Di tahun 1930 Hindia Belanda masa akhir dari pemerintahan kolonial terjadi krisis ekonomi yang dikenal dengan Depresi Ekonomi, kondisi yang juga turut melanda daerah lain di Jawa maupun di luar pulau Jawa. Depresi Ekonomi ini disebabkan oleh jatuhnya pasar saham Wall Street di Amerika pada bulan Oktober 1929 dan menyebabkan kepanikan masal para investor sehingga berimbas pada kacaunya perekonomian di seluruh dunia.

Ketika terjadi Depresi Ekonomi, rata-rata penghasilan rakyat pribumi di wilayah Hindia Belanda mengalami penurunan per kapitanya dibandingkan dengan kebutuhannya. Sebagian Penduduk Jawa terlilit hutang demi pemenuhan kebutuhan hidup, bahkan banyak yang menggadaikan tanah untuk jaminan kehidupan mereka. Dampak yang paling nyata bagi petani adalah kondisi kekurangan gizi terlebih mereka yang tidak mempunyai simpanan ataupun tabungan jangka panjang. Sering kali dijumpai penduduk hindia Belanda yang terlilit hutang dan pinjaman kredit dengan bunga yang mencekik.<sup>22</sup> Dampak Zaman Maleise atau depresi ekonomi menyebabkan turunnya keinginan penduduk pribumi yang hendak melaksanakan ibadah Haji di Makkah.

Depresi ekonomi pada masyarakat Jawa dipahami dengan istilah *Zaman Meleset*. Depresi ekonomi pada tahun 1930, dianggap sangat penting kedudukannya dalam perkembangan sejarah

---

<sup>19</sup> Pada awal abad ke-20, dengan semakin berkembangnya kebutuhan pemerintah Hindia Belanda akan birokrasi pribumi, orang-orang di luar trah *darah biru* mulai mendapat kesempatan untuk mencapai jabatan administratif tertentu dalam birokrasi pemerintahan, melalui jalur pendidikan dan kemampuan berbahasa Belanda. Golongan *priyayi* dengan demikian berkembang menjadi dua lapisan, yaitu golongan *priyayi* tinggi (keturunan ningrat) dan *priyayi* rendah (*priyayi* sekolahan). Lihat: Anonim, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1950) di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Jakarta: Dekdikbud, 1991), 12-14.

<sup>20</sup> Selo Sumarjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Yogyakarta: UGM Press, 1981), 39.

<sup>21</sup> Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 104.

<sup>22</sup> Sumitro Djojohadikusumo. *Kredit Rakyat Pada Masa Depresi*. (Jakarta: LP3ES, 1989), 14.

ekonomi di Indonesia dan mempengaruhi laju kehidupan masyarakat lokal termasuk kondisi perekonomian para haji. Depresi ekonomi di Hindia Belanda telah merubah kebijakan kolonial pemerintahan Hindia Belanda dan kondisi hidup masyarakat.<sup>23</sup>

Di wilayah Jawa terutama wilayah Yogyakarta, depresi ekonomi telah memporak-porandakan industri batik di Karangakjen dan Kauman dan juga industri lainnya seperti industri perak di Kotagede.<sup>24</sup> Karangakjen merupakan sebuah kampung yang berada di sebelah selatan kota Yogyakarta. Pemukiman tersebut dihuni oleh para haji yang berkecimpung dalam dunia Industri batik. Pada masa krisis tersebut, banyak perusahaan batik yang gulung tikar dan beralih ke perdagangan beras, kacang kedelai dan sebagainya.

Kegiatan ibadah haji yang dilakukan para jamaah yang berasal dari di Hindia Belanda tidak hanya untuk kepentingan pribadi, namun turut berpengaruh dalam hal lain di luar dirinya. Adanya daya tarik yang kuat untuk pergi ke Jeddah, banyak rakyat pribumi yang memaksakan diri meski secara bekal material belum tercukupi untuk berhaji. Salah satu langkah yang mereka upayakan adalah sikap hemat dan kerja keras walaupun harus dibayar dengan harga yang sangat murah. Para jamaah haji yang berhasil berangkat dengan kondisi bekal ekonomi yang terbatas di wilayah Hijaz dikenal dengan *haji miskin* oleh penduduk Arab.<sup>25</sup>

Sebagian besar calon haji mencari bekal materi dengan bekerja sebagai buruh perkebunan karet dan kelapa sawit di Singapura sebelum mereka berangkat ke Makkah. Para calon haji, menumpang kapal-kapal dagang yang menuju Singapura. Mereka terdorong untuk melakukan pekerjaan tersebut demi mengumpulkan bekal yang cukup sebagai biaya pelaksanaan ibadah haji. Selanjutnya banyak dari jamaah haji yang meninggalkan pekerjaan mereka di Singapura setelah berhasil menunaikan ibadah haji di Makkah. Ketika kembali ke kampung halaman, berbagai pengalaman dan pengetahuan sebagai buruh perkebunan sudah mereka dapatkan. Maka dari itu kemungkinan terbesar bahwa mereka yang berhaji dan bekerja sebagai buruh di Singapura inilah yang memperkenalkan penanaman karet di wilayah Sumatera dan Kalimantan.<sup>26</sup> Dalam perkembangan selanjutnya, penanaman karet dan kelapa sawit merupakan salah satu fungsi ekonomi terpenting dari haji.

Sebagian besar haji yang tidak mempunyai pengetahuan ekonomi yang memadai, mereka akan bertahan menjalani pekerjaan sebelumnya menjadi peternak, nelayan dan petani. Para haji yang bermukim di daerah kepulauan terpencil dan yang tidak memiliki lahan untuk pertanian dan

---

<sup>23</sup> William J.O' Malley, "Indonesia di masa Maleise: Suatu Studi terhadap Sumatera Timur dan Yogyakarta di tahun 1930an", *Prisma*, 8 Agustus 1983, 37-38.

<sup>24</sup> William J.O' Malley, "Indonesia di masa Maleise, 37.

<sup>25</sup> Putuhena, *Historiografi Haji*, 336.

<sup>26</sup> Putuhena, *Historiografi Haji*, 337.

perkebunan maka akan beralih mejadi pedagang eceran yang menjual barang-barang untuk konsumen lokal. Hal ini juga menimpa para haji yang menjual tanahnya untuk ibadah haji di makkah dan berprofesi menjadi petani sebelumnya, ketika mereka pulang akan beralih profesi menjadi pedagang eceran.<sup>27</sup>

Adapun motivasi dari para jemaah haji yang tiba di tanah air adalah membawa saudara ataupun keluarganya untuk melaksanakan haji suatu saat nanti. Upaya yang mereka lakukan dengan bekerja keras dan hidup hemat demi mengumpulkan pundi-pundi uang sebagai tabungan haji. Awalnya banyak calon haji yang jarang menabung, namun kemudian mereka berusaha menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk ditabung sehingga bisa mereka gunakan sebagai ongkos naik haji.<sup>28</sup> Masyarakat yang memiliki komitmen kuat ini akan menabung hingga puluhan tahun sampai tujuannya tercapai, meski sebenarnya mereka bukan golongan yang mampu secara ekonomi. Status haji ini akan menjadikan mereka golongan baru dan berdampak pada perubahan struktur ekonomi masyarakat desa. Pada akhirnya haji terbukti menciptakan etos umat islam yaitu kerja keras dan hidup hemat, menciptakan lapangan pekerjaan dan berkembangnya transaksi ekonomi antar daerah yang berbeda pulau.

Keinginan kuat untuk mencapai tujuan pergi ke makkah telah merubah pola kebiasaan masyarakat untuk melakukan sesuatu yang belum pernah sebelumnya. Mereka sekuat tenaga berupaya meningkatkan perekonomian dengan bekal semangat dan kerja keras. Para haji ini memiliki sumber pendapatan utamanya berasal dari kepemilikan tanah, peternakan, dan perdagangan yang mereka jalankan. Beberapa kelompok haji ini sebelumnya mereka mengajar madrasah rela tidak dibayar, kemudian mereka mulai mau menerima upah karena ini termasuk ke dalam salah satu upaya untuk menambah penghasilan.<sup>29</sup>

Salah satu bentuk kewibawaan para haji di lingkungan masyarakat adalah dengan menjadi penasehat spiritual. Upaya ini dilakukan dengan tujuan membawa mereka kepada kesuksesan yang lebih besar dalam ibadah dan lingkungan sosial. Ketika menjalankan roda perekonomian mereka cenderung bersikap efisien dalam penambahan modal usaha, dengan motif untuk mengembangkan usaha serta memperbaiki kehidupan keturunan selanjutnya. Para haji ini hampir sebagaian besar memiliki tanah pribadi, sehingga secara ekonomi lebih stabil dalam kemandirian. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh kaum haji dan pemilikan atas tanah telah meningkatkan kedudukan mereka di lingkungan tempat mereka tinggal.

---

<sup>27</sup> Putuhena, *Historiografi Haji*, 338.

<sup>28</sup> Snouck Hurgronje, "Politik Haji?" terj. Soedarso Soekarno, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*, jld. VIII (Jakarta: INIS, 1993), 111.

<sup>29</sup> Sartono Kartodirjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), 85-86

Sebagian dari haji mengembangkan usaha peminjaman uang kepada mereka yang membutuhkan, tentunya disertai dengan bunga. Haji yang bergerak di bidang ini mengikuti syaikh di Makkah yang biasa meminjamkan uangnya untuk jamaah haji. Pengeluaran biaya perjalanan haji yang begitu banyak memunculkan dugaan bagi seseorang yang telah kembali dari Tanah Suci bahwa mereka akan menjadi miskin dan hidup kekurangan. Sebagian kecil dari mereka memang tidak meningkat secara ekonomi, namun tidak sampai jatuh miskin. Perjalanan haji ke Makkah seringkali menimbulkan pikiran bagi mereka yang akan pulang ke tanah air, salah satunya menjadi miskin dan hidup dalam keterbatasan. Kenyataannya sebagian mereka tidak mengalami peningkatan ekonomi secara drastis, namun juga tidak sampai jatuh miskin. Di lain hal, para haji ini juga mempunyai keyakinan bahwa setiap hasil usaha yang mereka upayakan sebelum berangkat haji termasuk amalan yang baik. Secara ekonomi, pelaksanaan ibadah haji memang membuat harta berkurang namun memunculkan keyakinan kolektif harta itu tidak sekedar memenuhi kebutuhan jasmani saja, tetapi lebih pada kepuasan mempergunakan harta dengan tujuan ibadah.<sup>30</sup>

Selanjutnya, ibadah haji dalam tahun-tahun berikutnya mempengaruhi kemajuan ekonomi dari pihak-pihak yang berhubungan dengan ibadah ini. Banyak keuntungan besar diperoleh oleh pihak terkait diantaranya pedagang perantara, perusahaan pelayaran serta pemerintah Kolonial Belanda. Pedagang perantara adalah istilah untuk menyebut mereka yang membeli hasil pertanian ataupun perkebunan milik calon jamaah haji, yang kemudian mereka jual kembali kepada pedagang besar. Sebagian besar calon haji mendapatkan biaya perjalanan haji dari penjualan hasil pertanian maupun perkebunan. Pada periode ini pula telah muncul sistem *ijon*. Petani yang hasil pertanian ataupun perkebunannya dirasa tidak mencukupi sebagai biaya perjalanan haji akan meminjam uang kepada pedagang perantara. Petani yang meminjam diwajibkan mengembalikan uang tersebut pada musim panen yang akan datang, tentunya dengan disertai tambahan bunga. Keuntungan yang didapatkan oleh pedagang perantara jauh lebih sedikit dibandingkan perusahaan pelayaran yang mengangkut jamaah haji.

Perjalanan haji dari kepulauan Nusantara menuju ke Jeddah telah mempengaruhi berdirinya beberapa perusahaan pelayaran yang khusus mengangkut calon jamaah haji. Perusahaan pelayaran untuk pengangkutan jamaah haji dari Hindia Belanda dimulai pada tahun 1825 yang dilakukan oleh Syaikh Umar Bugis, pedagang Arab yang memiliki perusahaan pelayaran.<sup>31</sup>

Pada tahun 1874, pengangkutan jamaah haji nusantara juga diramaikan oleh perusahaan pelayaran milik pemerintahan Inggris dengan pelabuhan embarkasi Singapura.<sup>32</sup> Melihat Inggris

---

<sup>30</sup> Sartono Kartodirjo, *Pemberontakan..*, 339.

<sup>31</sup> Sartono Kartodirjo, *Pemberontakan..*, 134.

<sup>32</sup> *Indisch Verslag 1939: Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch Indie*. Dell (Batavia: Landsrukkerij, 1940), 138.

dan pedagang Arab yang meraup keuntungan besar dari bisnis pelayaran ini, pemerintah kolonial yang sebelumnya enggan untuk mengurus masalah pengangkutan haji pada akhirnya tertarik untuk turut mencari keuntungan dari pengangkutan haji melalui jalur laut. Pemerintah kolonial kemudian langsung mendirikan tiga perusahaan pengangkutan jamaah haji. Tiga perusahaan tersebut adalah Nederland, Rotterdamsche Llyod, dan Ocean Maatschappij.<sup>33</sup>

Ketiga perusahaan milik Belanda dikenal dengan nama *Kongsi Tiga* yang memegang hak monopoli penuh terhadap pengangkutan jamaah haji di wilayah Hindia Belanda. Para jamaah haji yang ikut kapal Kongsi Tiga wajib untuk membeli tiket pergi-pulang. Hal ini pula yang menyebabkan banyak para calon haji dari Jawa, Sumatra dan Kalimantan lebih memilih untuk berangkat dari embarkasi Singapura milik pemerintah Inggris. Adapun alasannya harga tiket jauh lebih murah, dan tidak ada kewajiban untuk membeli tiket pulang dari perusahaan Inggris.

Pemerintah kolonial dan perusahaan pelayaran merupakan pihak yang sangat diuntungkan karena berada di posisi sebagai penjual jasa di bidang transportasi laut sementara umat Islam tidak lebih dari sekedar konsumen pembeli atau pengguna jasa tersebut. Selain itu pemerintah Belanda juga kembali meraup keuntungan besar dari para jamaah haji yaitu dengan memberikan jasanya berupa *pas-jalan* dan *visa* sehingga kas pemerintahan semakin terisi. Sejumlah jamaah haji yang ingin mengambil *pas-jalan* baik di Hindia Belanda maupun di konsulat di Jeddah harus membayar sejumlah uang tertentu. Sejak tahun 1810, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang mengekang umat Islam yang ingin mengadakan perjalanan haji. Belanda menciptakan rintangan guna menghambat proses perjalanan haji yaitu para calon calon haji yang akan melaksanakan ibadah ke Makkah harus membayar pas jalan (*reispas*) sebanyak 110 golden dan bagi mereka yang ketahuan tidak memiliki pas jalan akan dikenakan denda sebesar 1000 gulden.

## KESIMPULAN

Ibadah haji yang dikerjakan oleh haji yang berasal dari wilayah Hindia Belanda mempunyai peran besar terhadap perkembangan ekonomi masyarakat lokal. Kegiatan ekonomi yang dimotori para haji berpengaruh dalam sektor perdagangan dan menghasilkan berbagai keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh kaum haji. Salah satunya adalah kepemilikan atas tanah telah meningkatkan kedudukan mereka di lingkungan tempat mereka tinggal. Pada akhirnya haji ini terbukti konsisten untuk bekerja keras dan hidup hemat, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengembangkan transaksi ekonomi antar daerah yang berbeda pulau. Sebelumnya perdagangan hanya bersifat lokal, namun melalui jaringan solidaritas sesama haji mereka mulai merajut hubungan perekonomian di

---

<sup>33</sup> *Statistiek van de Scheepvaart in Nederlandsch Indie over het jaar 1928*. (Samengesteld bij het hoofdkantoor van Scheepvaart), (Weltevreden: F.B. Smiths, 1929), 2.

berbagai daerah di Hindia Belanda. Selanjutnya sebagian besar kelompok haji yang sebelumnya mereka mengamalkan ilmu dengan cara mengajar madrasah rela tidak dibayar, kemudian mereka mulai menerima upah karena hal itu termasuk ke dalam salah satu upaya untuk menambah penghasilan mereka. Dilain pihak sebagian dari haji ini juga mengembangkan usaha peminjaman uang kepada mereka yang membutuhkan, tentunya disertai dengan bunga. Haji yang bergerak di bidang ini mengikuti sebagian syaikh di Makkah yang biasa meminjamkan uangnya untuk jamaah haji. Para haji ini juga menjadi pedagang antara yang melanggengkan sistem *ijon*. Keyakinan kolektif di antara para haji bahwa harta itu tidak sekedar memenuhi kebutuhan jasmani saja, tetapi lebih pada kepuasan memanfaatkan harta yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Dalam hal ini ibadah haji tentunya telah mempengaruhi kemajuan ekonomi dari pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan ibadah tersebut seperti pedagang perantara, perusahaan pelayaran serta pemerintahan kolonial Belanda.

## REFERENSI

- Ahmad, Fathoni. "Sejarah Haji Di Era Kolonial Hindia Belanda." NU Online. Accessed July 31, 2023. <https://www.nu.or.id/fragmen/sejarah-haji-di-era-kolonial-hindia-belanda-tlGMF>.
- Djojohadikusumo, Sumitro, *Kredit Rakyat Pada Masa Depresi*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Douwes Dick dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*, terj. Soedarso Soekarno. Jakarta: INIS, 1997.
- Hafizi, Muniful Ichsan Al, and Adelia Intan Ardiani. "Historiografi Al-Qur'an Akbar Gagasan Kh. Muntaha Al-Hafidz Di Pondok Pesantren Al-Asy'Ariyyah Tahun 1991-1994." *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 3, no. 2 (2022): 16–27. <https://doi.org/10.22515/isnad.v3i2.5967>.
- Hurgronje, Snouck. *Islam di Hindia Belanda*, trj. S. Gunawan. Jakarta: Bahrataraya Karya Aksara, 1973.
- \_\_\_\_\_. *Politik Haji?* terj. Soedarso Soekarno, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*, Jld. VIII. Jakarta: INIS, 1993.
- Indisch Verslag 1939: Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch Indie*. Batavia: Landsrukkerij, 1940.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium*. Jakarta: Gramedia Utama, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jld IV. Jakarta: Balai Pustaka, 1977.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.

- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Mahanani, Qisthi Faradina Ilma, Mega Alif Marintan, Irma Ayu Kartika Dewi, and Moh. Ashif Fuadi. "ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA (Perspektif Sejarah)." *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 3, no. 1 (2022): 62–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/isnad.v3i1.5395>.
- Malley, William J.0', "Indonesia di masa Malaise: Suatu Studi terhadap Sumatera Timur dan Yogyakarta di tahun 1930an", *Prisma*, 8 Agustus 1983.
- Putuhena, M Shaleh. *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Selo Sumarjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: UGM Press, 1981.
- Statistiek van de Scheepvaart in Nederlandsch Indie over het jaar 1928*. Weltevreden: F.B. Smiths, 1929.
- Steenbrink, Karel A. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Suminto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Sutherland, Heather, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Wibowo, Eka Yudha. "Ibadah Haji Dan Kontribusinya Terhadap Berbagai Bidang Sosial Masyarakat Di Indonesia (Tahun 1900-1945)." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 4, no. 2 (2019): 75–91. <https://doi.org/10.22515/shahih.v4i2.1875>.